



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta pada tanggal 2 September 1992 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 2 September 1992 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Spanyol, dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 1993
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd.

Bambang Kesowo, S.H., LL.M



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

**PERSETUJUAN PERDAGANGAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK CHILE**

=====

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Chile, selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.

Berhasrat untuk memperluas dan memperkuat hubungan perdagangan antara kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip persamaan yang saling menguntungkan dan perlakuan negara yang paling menguntungkan yang bertujuan untuk menggalakkan perkembangan ekonomi masing-masing negara.

Sesuai dengan Kesepakatan Bersama di bidang Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile, yang ditandatangani di Jakarta tanggal 8 Mei 1987.

Telah sepakat sebagai berikut :

Pasal I

Para Pihak akan, sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan masing-masing negara, melaksanakan tindakan-tindakan yang tepat untuk memberikan kemudahan-kemudahan, memperkuat mengkonsolidasikan dan mendiversifikasi perdagangan antara kedua negara.

Pasal II

Para pihak akan, dalam batas-batas perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, saling memberi perlakuan yang saling menguntungkan bagi negara dalam hal bea dan cukai dan pajak-pajak lainnya yang dikenakan dalam perdagangan kedua negara yang telah disetujui oleh mereka dalam Persetujuan Umum mengenai Perdagangan dan Tariff (GATT).

Dalam masalah-masalah mengenai akses ke pasar yang timbul dalam hubungan perdagangan mereka, kedua Pihak atas permintaan salah satu Pihak, dengan semangat kerjasama dan saling pengertian mencari jalan keluar yang layak.

Pasal III...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal III

Perlakuan dalam Pasal II tidak berlaku dalam hal-hal :

- a. Perlakuan preferensi khusus dan keuntungan-keuntungan dari para Pihak yang telah diberikan kepada negara-negara tetangga dalam rangka pemberian kemudahan kegiatan lalu lintas, perdagangan diperbatasan dan.
- b. Perlakuan preferensi eksklusif yang dihasilkan dari persetujuan-persetujuan perdagangan bebas atas wilayah perdagangan bebas atau kelompok ekonomi regional dimana salah satu pihak menjadi atau akan menjadi anggota.

Pasal IV

Para pihak sepakat, berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing, akan memberikan kemudahan untuk berpartisipasi dalam pameran dagang dan mengatur kunjungan para pengusaha dari pusat-pusat perdagangan.

Pengecualian terhadap pajak dan cukai dan pungutan-pungutan lain terhadap barang-barang dan contoh-contoh produk yang akan digunakan dalam pameran dagang, termasuk perijinan pemerintah ijin meninggalkan tempat, penjualan dan penyebaran akan diberlakukan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan negara dimana pameran dagang itu diselenggarakan.

Pasal V

Semua pembayaran-pembayaran dalam rangka Persetujuan ini dilakukan dalam mata uang-mata uang yang bebas dipertukarkan (convertible), sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing negara.

Pasal VI

Para pihak, sesuai dengan hukum dan peraturan-peraturan masing-masing akan memberikan segala bantuan yang diperlukan kepada perorangan yang dikirim oleh negara yang bersangkutan untuk melakukan pekerjaan dan untuk menjamin pekerjaan mereka berhasil.

Pasal VII

Para wakil dari kedua pihak, atas permintaan salah satu pihak bersedia dengan semangat kerjasama dan saling pengertian, melakukan pembicaraan tentang tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memperluas hubungan perdagangan antara kedua negara dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini. Tempat dan waktu pembicaraan tersebut atas dasar kesepakatan bersama akan ditetapkan apabila dirasakan perlu oleh kedua pihak.

Pasal VIII...

Pasal VIII



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Persetujuan ini tidak akan menghalangi kedua pihak untuk melaksanakan larangan-larangan ataupun pembatasan terhadap segala tindakan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan keamanan dan kesehatan umum atau untuk mencegah penyebaran penyakit dan hama terhadap hewan-hewan dan tanaman-tanaman.

Pasal IX

Setiap perselisihan yang timbul mengenai tafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan secara penuh persahabatan melalui saluran diplomatik antara kedua belah pihak.

Pasal X

Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir mengenai pengesahan yang dilakukan masing-masing pihak sesuai persyaratan konstitusional masing-masing, telah dipenuhi. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan tetap berlaku selanjutnya selama 3 (tiga) tahun berikutnya dan seterusnya kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis maksudnya untuk mengakhiri Persetujuan ini dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya Persetujuan ini.

Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini tetap berlaku terhadap semua kontrak-kontrak yang dibuat semasa berlakunya Persetujuan ini, meskipun Persetujuan ini telah berakhir.

Atas permintaan salah satu pihak, Persetujuan ini dapat dirubah dengan kesepakatan bersama.

SEBAGAI BUKTI yang bertandatangan dibawah ini, yang dikuasakan oleh Pemerintah mereka masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal 2 September 1992, dalam rangkap 3 (tiga) asli masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol dan Bahasa Inggris, ketiga naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan dalam penafsiran, Naskah Bahasa Inggris yang akan dipergunakan.

ATAS NAMA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

ALI ALATAS
Menteri Luar Negeri

ATAS NAMA PEMERINTAH
REPUBLIK CHILE

ENRIQUE SILVA CIMMA
Menteri Luar Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

ACUERDO COMERCIAL
ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE
Y
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA

=====

El Gobierno de la Republica de Chile y el Gobierno de la Republica de Indonesia, en adelante referidos como las Partes;

Deseosos de expandir y robustecer las relaciones comerciales entre los dos paises sobre la base de los principios de igualdad, mutuo beneficio y de nacion mas favorecida para el proposito de incrementar sus respectivos desarrollos economicos;

Teniendo en cuenta el Memorandum de Entendimiento sobre Comercio entre el Gobierno de la Republica de Chile y el Gobierno de la Republica de Indonesia, firmado en Jakarta el 8 de mayo de 1987;

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE :

ARTICULO I

Las Partes, en el marco de sus respectivas leyes y reglamentos, tomaran todas las medidas apropiadas para facilitar, robustecer, consolidar y diversificar el comercio entre los dos paises.

ARTICULO II

Las Partes, dentro de los limites de las leyes y reglamentos vigentes en sus respectivos paises, se otorgaran reciprocamente el tratamiento de nacion mas favorecida con respecto a aranceles aduaneros, y otros impuestos y derechos aplicables al intercambio comercial entre los dos paises tal como ha sido por ellos convenido en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT).

En caso de que surjan problemas de acceso al mercado en su relacion comercial ambas partes, a requerimiento de una de ellas, buscaran una solucion adecuada con espiritu de cooperacion y mutuo entendimiento.

ARTICULO III...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

ARTICULO III

Lo dispuesto en el Artículo II no se aplicara a :

- a) Preferencias y ventajas que cualquiera de las partes haya otorgado o pueda otorgar a países vecinos para facilitar su comercio fronterizo; y
- b) Tratamiento preferencial exclusivo que resulte de cualquier union aduanera o areas de libre comercio o grupos economicos regionales de los cuales cualquiera de las partes sea o pueda llegar a ser miembro.

ARTICULO IV

El intercambio de bienes y productos entre ambos países se llevara a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en cada país.

ARTICULO V

Las Partes acordaran, con sujecion a sus respectivas leyes y reglamentos, conceder facilidades para la participacion en ferias y exposiciones, y organizar visitas de hombres de negocio o delegaciones comerciales.

Las exenciones de derechos aduaneros y otros gravámenes similares sobre artículos y muestras destinados a ferias y exposiciones, así como su ingreso, egreso, venta y disposicion estara sujeto a las leyes y reglamentos del país donde las ferias o exposiciones tengan lugar.

ARTICULO VI

Todos los pagos hechos al amparo del acuerdo seran efectuados en divisas libremente convertibles de conformidad con los reglamentos vigentes en ambos países, respectivamente.

ARTICULO VII

Cada parte, de acuerdo con sus leyes y reglamentos, otorgara a los individuos de la otra enviados a cada país de conformidad a las disposiciones de este Acuerdo, toda la asistencia necesaria para facilitar sus trabajos y asegurar el desarrollo exitoso de sus tareas.

ARTICULO VIII...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

ARTICULO VIII

Los representantes de ambas partes, a petición de cualquiera de ellas, en el espíritu de cooperación y mutuo entendimiento discutirán medidas destinadas a ampliar la relación comercial entre los dos países y solucionar los problemas que surjan de la aplicación de este acuerdo. El lugar y fecha de estas conversaciones será establecido, si se estima necesario, de mutuo acuerdo.

ARTICULO IX

El presente Acuerdo no impedirá a cualquiera de las partes para establecer prohibiciones o restricciones de cualquier

magnitud destinadas a la protección de sus intereses esenciales de seguridad y salud pública o para la prevención de enfermedades y pestes en animales o plantas.

ARTICULO X

Cualquier disputa que surja de la interpretación o aplicación de las disposiciones de este Acuerdo será solucionada amistosamente a través de los canales diplomáticos entre las Partes.

ARTICULO XI

Este Acuerdo entrará en vigencia en la fecha de la última notificación por la cual las Partes se comuniquen que sus exigencias constitucionales han sido cumplidas. Regirá por un período de 3 (tres) años, y continuará en vigencia subsecuentemente por otro período de 3 (tres) años, así sucesivamente a menos que cualquiera de las Partes notifique por escrito de su intención de terminarlo 3 (tres) meses antes del término de su vigencia.

Las disposiciones de este Acuerdo se mantendrán igualmente aplicables después de su terminación con respecto a todos los contratos celebrados durante el período de su vigencia, pero que no han completado su ejecución a la fecha de su expiración.

A petición de cualquiera de las partes, el presente Acuerdo puede ser revisado de mutuo consentimiento.

En testimonio de lo cual los abajo firmantes, debidamente autorizados al efecto por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo.

HECHO...

HECHO en Jakarta, Indonesia, el dos de septiembre de mil novecientos noventa y dos, en



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

3 (tres) originales en idiomas español, indonesio e inglés siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación de los textos en idioma español e indonesio, el texto en inglés prevalecerá.

POR EL GOBIERNO DE
LA REPUBLICA DE CHILE

POR EL GOBIERNO DE
LA REPUBLICA DE INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

**TRADE AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE**

=====
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Republic of Chile, hereinafter referred to as the Parties;

Desirous of expanding and strengthening trade relations between the two countries on the basis of the principles of equality, mutual benefit and most favoured nation for the purpose of enhancing their respective economic development;

In pursuance of the Memorandum of Understanding on Trade between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile, signed in Jakarta, May 8, 1987;

Have agreed as follows :

Article I

The Parties shall, within the framework of their respective laws and regulations, take all the appropriate measures to facilitate, strengthen, consolidate and diversify the trade between the two countries.

Article II

The Parties shall, within the limit of laws and regulations in force in their respective countries, grant each other most favoured nation treatment with respect to customs duties and other taxes and duties applicable to trade exchange between the two countries as agreed upon by them in the General Agreement on Trade and Tariff (GATT).

In case problems of access to market in their trade relations emerge, both Parties upon request by one of them, shall in the spirit of cooperation and mutual understanding find an adequate solution.

Article III

The provisions of Article II shall not apply to :

(a) Preferences and advantages which either of the Parties has granted or may grant to neighbouring countries in order to facilitate their frontier trade; and

(b) Exclusive...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (b) Exclusive preferential treatment which results from any customs unions or free trade areas or regional economic groupings to which either of the Parties is or may become a member.

The trade of goods and products between the two countries, will be carried out in accordance with the prevailing laws and regulations of the respective countries.

Article IV

The Parties shall agree, subject to their respective laws and regulations, to accord facilities for participating in fairs and exhibitions, and organize visits of businessmen of trade centers.

Exemption from customs duties and other similar charges on articles and samples intended for fairs and exhibitions, as well as their entry, leaving, sale and disposition shall be subject to the laws and regulations of the country where the fairs or exhibitions are held.

Article V

All payments under the Agreement shall be freely made in all convertible currencies in accordance with the regulations in force in the two respective countries.

Article VI

Each Party shall, in accordance with its existing laws and regulations, grant to the individuals of the other sent to each country pursuant to provisions of this Agreement, all assistance necessary to facilitate their work and ensure the successful performance of their tasks.

Article VII

The representatives of both Parties, upon request by either of them, shall in the spirit of cooperation and mutual understanding discuss measures aimed at broader trade relations between the two countries and solution of problems arising from the implementation of this Agreement. The place and date of such discussions shall be established if deemed necessary by mutual consent.

Article VIII

The present Agreement shall not prevent either of the Parties from applying prohibition or restriction of any measure which is directed to the protection of its essential security interest and public health or the prevention of diseases and pests in animals or plants.

Article IX...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Article IX

Any dispute arising out of the interpretation or implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably through diplomatic channels between the Parties.

Article X

This Agreement shall enter into force on the date of the last notification by which the Parties notify each other that their constitutional requirements have been fulfilled. It shall be valid for a period of 3 (three) years and shall continue in force thereafter for another period of 3 (three) years and so forth unless either Party notifies in writing of its intention to terminate this Agreement 3 (three) months before expiry of this Agreement.

The provisions of this Agreement shall remain equally applicable after its termination in respect of all contracts concluded during the period of its validity but which have not been fully implemented on the date of its expiry.

At the request of either Party, the present Agreement may be revised by mutual consent.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Jakarta on 2nd of September 1992 in 3 (three) originals in the Indonesian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on the interpretation of the Indonesian and Spanish texts, The English text shall prevail.

For the Government of the
Republic of Indonesia

For the Government of the
Republic of Chile

ALI ALATAS
Minister for Foreign Affairs

ENRIQUE SILVA CIMMA
Minister of Foreign Affairs